

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah dengan memberi kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakannya otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan memberikan hak penuh kepada daerah otonom untuk dapat mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dengan menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah telah mampu meningkatkan daya saing daerah, dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mandiri dan mencari sumber penerimaan keuangan sendiri sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Demi menunjang terselenggaranya perencanaan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di pasal 6 ayat 1 menjelaskan

tentang sumber-sumber PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah dan pajak daerah merupakan salah satu penerimaan yang mendominasi pendapatan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota diberikan kesempatan atau peluang untuk lebih menggali potensi-potensi dari berbagai sumber alokasi dana dengan melakukan penetapan jenis-jenis retribusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang tercantum dalam Bab VI Pasal 108 Ayat (1) disebutkan bahwa retribusi memiliki objek yang dibagi atas suatu jasa yang sebelumnya telah disediakan oleh pihak Pemerintah Daerah, diantaranya retribusi berdasarkan jasa umum, retribusi melalui jasa usaha, serta retribusi melalui perizinan tertentu.

Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab VI Pasal 108 ayat 1 mengamanatkan bahwa objek retribusi terbagi atas berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi-retribusi tersebut merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya, sejalan dengan perkembangan dunia digital yang semakin pesat membuat peluang perolehan retribusi juga dapat meningkat khususnya pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Era revolusi Industri 4.0 menuntut masyarakat dunia, khususnya Indonesia untuk bergantung pada teknologi telekomunikasi dan informasi, hal ini sejalan dengan perkembangan zaman yang hampir setiap aktivitas manusia tidak terlepas dari digitalisasi, bahkan bisa dikatakan kebutuhan teknologi telekomunikasi dan informasi saat ini sudah seperti kebutuhan pokok, dan tidak sedikit dari kita yang sampai memasang *Wireless Fidelity (Wifi)*. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan teknologi telekomunikasi dan informasi telah membuat industri di bidang telekomunikasi dan informasi berlomba-lomba melakukan pengembangan industrinya, dan salah satu langkah mereka adalah dengan memperbanyak jaringan internet hingga ke pelosok pedesaan, dengan membuka akses jaringan internet melalui pendirian menara telekomunikasi.

Pendirian menara telekomunikasi yang tidak terkendali dan terkontrol dengan baik, akan berdampak buruk bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat, salah satunya akan mengurangi tata ruang lahan produktif dan dampak radiasi serta ancaman arus bertegangan tinggi yang sewaktu-waktu dapat membahayakan masyarakat, sehingga hal tersebut membuat Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melakukan pengendalian atas pendirian menara telekomunikasi dengan tujuan agar pendirian menara telekomunikasi dapat terkendali dan terarah sehingga tidak mengganggu penggunaan tata ruang produktif, meminimalisir dampak buruk terhadap masyarakat, dan dapat mengatur batas maksimal pendirian Menara, disamping itu pengendalian menara telekomunikasi dapat menjadi kesempatan bagi pihak Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya melalui

peningkatan sumber pendapatan dengan pelaksanaan retribusi jasa umum pengendalian menara telekomunikasi.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 124 retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan ruang atau wilayah dengan tujuan untuk membangun menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti aspek tata kelola ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa pengendalian menara telekomunikasi dapat diinterpretasikan sebagai salah satu upaya atau cara untuk mengawasi, mengendalikan, memantau, dan memonitoring perizinan menara telekomunikasi berdasarkan kondisi secara fisik dari menara telekomunikasi yang akan dibangun, potensi yang dimiliki atas dibangunnya menara telekomunikasi tersebut, dan kemungkinan munculnya risiko atas dibangunnya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata kelola ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika, yang memiliki fungsi melaksanakan pengaturan, pengawasan,

pengendalian, dan pemberian perizinan di bidang komunikasi dan informatika. Operasi dan pembangunan menara telekomunikasi secara bersama-sama, wajib didasarkan atas rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah dengan pelaksanaan secara berkala dan bertahap. Perda Kabupaten Cirebon No 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, Pasal 2 menjelaskan bahwa rencana induk menara bersama telekomunikasi dapat digunakan untuk menjaga, memberikan arahan, serta menjamin kepastian supaya proses pembangunan maupun pelaksanaan operasi menara bersama telekomunikasi di suatu daerah dapat dilaksanakan secara terstruktur yang didasarkan dengan orientasi masa depan, terintegrasi, maupun memberikan manfaat bagi seluruh pihak secara menyeluruh.

Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.071,05 km², dan jumlah penduduk mencapai 2,270,621 jiwa dengan komposisi 1,151,925 jiwa penduduk laki-laki dan 1,118,696 jiwa penduduk perempuan. Padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana telekomunikasi yang semakin hari semakin tinggi tingkat kebutuhannya. Dalam meningkatkan sumber pendapatannya melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Telekomunikasi dan Informatika sebagai bentuk pembayaran dalam memberikan pelayanan, pengawasan, maupun pengendalian menara telekomunikasi di suatu daerah diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon sesuai dengan target yang harus tercapai.

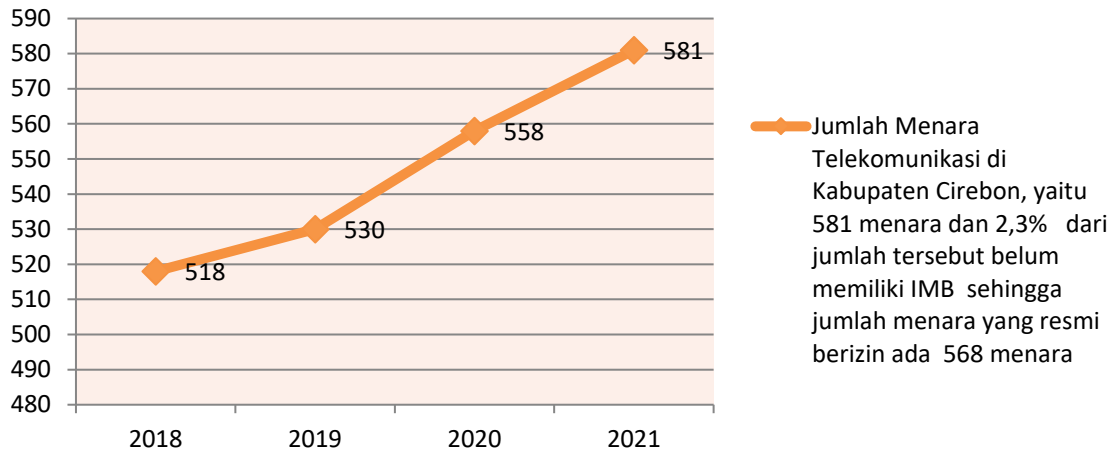
Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pendapatan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA. 2018 s/d 2021

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PAD	%
1	2018	1.800.000.000,00	2.142.353.625,00	584.810.843.481,60	0,36%
2	2019	1.500.000.000,00	1.749.111.750,00	727.798.823.861,38	0,24%
3	2020	1.800.088.450,00	2.401.254.375,00	733.241.269.372,02	0,33%
4	2021	1.800.088.450,00	2.479.782.525,00	846.456.257.038,54	0,29%

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan data penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon mengalami pasang surut, seperti pada tahun 2019 mengalami penurunan penerimaan, dari yang sebelumnya di tahun 2018 sebesar Rp. 2.142.353.625,00 dari total Pendapatan Asli Daerah Rp. 584.810.843.481,60 atau 0,36% menurun menjadi Rp. 1.749.111.750,00 dari total Pendapatan Asli Daerah Rp. 727.789.823.861,38 atau 0,24% bahkan bukan hanya penerimaan yang menurun tetapi untuk target di tahun 2019 juga diturunkan dari yang sebelumnya Rp. 1.800.000.000,00 di tahun 2018 menjadi Rp. 1.500.000.000,00, penurunan target dan realisasi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan baik itu permasalahan yang ada di internal maupun eksternal pemerintahan.

Gambar 1. 1
Grafik Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon



Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Cirebon

Grafik diatas menggambarkan jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon yang berjumlah 581 menara dengan total menara telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 568 menara dan yang belum memiliki IMB sebanyak 2,3% atau 13 menara, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon karena data yang diperoleh dari empat tahun terakhir menyatakan bahwa jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon terus meningkat setiap tahunnya bahkan sampai dengan 5,4% pada tahun 2020.

Pentingnya keberadaan menara telekomunikasi untuk pembangunan di era digitalisasi saat ini harus diimbangi dengan mempertimbangkan dampak negatif dari pembangunan menara telekomunikasi tersebut, karena jika terus dibiarkan tanpa ada kontrol maka tidak menutup kemungkinan di masa mendatang Kabupaten Cirebon akan menjadi hutan tower dan bahaya dari dampak keberadaan menara telekomunikasi akan terus mengancam kenyamanan serta keberlangsungan hidup masyarakat seperti dikutip dari Galugu et al., (2016) dari

hasil kajian dampak pengembangan *Base Transceiver Station* atau yang disingkat dengan BTS yang artinya menara telekomunikasi terhadap keadaan di suatu daerah maupun lingkungan yang ada di Kota Kendari, persentase ancaman yang paling tinggi, yaitu bahaya roboh, kemudian kerusakan barang elektronik, dampak radiasi, kebisingan, dan pengurangan lahan produktif. Jika mengacu pada teori tersebut maka hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pemanfaatan keberadaan menara telekomunikasi sebagai peluang pendapatan dan di saat yang bersamaan harus menekan pengembangan menara telekomunikasi karena bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat ditambah lagi dengan persentase penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang cukup kecil dengan rata – rata pertahunnya hanya berkontribusi sebanyak 0,3 % dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dengan jumlah menara sebanyak 581 penerimaan retribusinya bisa lebih dari yang diterima saat ini seperti yang sudah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon yaitu :

Tabel 1. 2
Selisih antara Realisasi dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No	Uraian	SKR	Realisasi	Selisih
1	2	3	4	5
1	PT. Centratama Menara Indonesia	107.090.250,00	107.090.250,00	-

2	PT. Dayamitra Telekomunikasi	270.813.000,00	636.523.275,00	365.710.275,00
3	PT. Gametraco Tunggal	20.270.250,00	-	(-20.270.250,00)
1	2	3	4	5
4	PT. Hutchison CP Telecommunications	50.979.750,00	50.979.750,00	-
5	PT. Indosat	85.099.500,00	85.568.250,00	468.750,00
6	PT. Inti Bangun Sejahtera	150.021.375,00	150.021.375,00	-
7	PT. Profesiinal Telekomunikasi Indonesia	685.612.125,00	664.486.125,00	(-21.126.000,00)
8	PT. Persada Sokka Tama	30.037.500,00	30.037.500,00	-
9	PT. Smart Fren Telecom	6.661.125,00	6.661.125,00	-
10	PT. Solusi Tunas Pratama	254.541.375,00	254.541.375,00	-
11	PT. Telkomsel	407.204.250,00	32.041.875,00	(-375.162.375,00)
12	PT. Tower Bersama Grup	447.314.625,00	421.444.125,00	(-25.870.500,00)
13	PT. XL Axiata, Tbk	190.681.500,00	40.387.500,00	(-150.294.000,00)
Jumlah		2.706.326.625,00	2.479.782.525,00	(-226.544.100,00)

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

Berdasarkan sampel data di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon seharusnya menerima retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 2.706.326.625,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 2.479.782.525,00 sehingga masih ada sebesar Rp. 226.544.100,00 yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon belum optimal. Selain itu ketidaktercapaian penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Tahun 2019 dan minimnya penerimaan retribusi di tahun 2020 dan 2021 yang kurang sebanding dengan peningkatan jumlah menara yang semakin banyak ditambah lagi dengan ancaman bahaya dampak fenomena hutan tower menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian terkait “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Cirebon)”.

1.2. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Cirebon)”, merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh penulis dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan program Diploma IV, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat” yang dilakukan pada tahun 2015 silam termuat dalam jurnal Elsy, Rosemary (2015), *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat*, Otonomi Keuangan Daerah, Vol. 3 (1). pp. 1-15. Untuk mengetahui dan memvalidasi keaslian penelitian ini, penulis berpedoman pada beberapa penelitian terdahulu yang ditunjukkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	M. Ihsanul Habibi (2016) Jom Fisip Vol. 3 No. 2	Strategi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Penerimaan	Teori pada penelitian yang digunakan pada penelian ini, yaitu teori manajemen strategi	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru mempunyai strategi baru yang ditinjau dari segi teknologi bahwa terdapat dorongan untuk meningkatkan	Kesamaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan untuk perbedaannya, yaitu pada teori pada penelitian yang dilakukan Ihsanul Habibi menggunakan teori manajemen strategi operasional,

		Retribusi Pengendalian	operasional	penerimaan retribusi daerah yang sudah memprioritaskan	sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT
1	2	3	4	5	6
		Menara Telekomunikasi,		pemanfaatan berkembangnya teknologi. Terlebih lagi dari segi informasi masih belum dilakukan secara teknis dan jika ditinjau dari segi market digital, pihak Dishubkominfo Kota Pekanbaru belum memanfaatkan potensi market digital, sehingga upaya yang dilakukan belum begitu optimal.	untuk menemukan strategi mengoptimalkan kekuatan maupun peluang yang ada, namun juga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman yang datang.
2	Nur Afiyah Maizunati (2018) Jurnal Rak, Volume 3 No. 1	Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Magelang Tahun 2016-2017,	Teori pada penelitian yang digunakan pada penelian ini, yaitu teori analisis SWOT	Dari hasil kajian bahwa sampai dengan akhir tahun 2017, diprediksi potensi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang mampu mencapai Rp. 266.509.866,10 (deviasi $\pm 3,42\%$). Rata-rata potensi retribusi untuk satu kali pengawasan sebesar Rp. 22.209.155,51 (deviasi $\pm 3,42\%$).	Kesamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan menggunakan matriks SWOT sedangkan perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan Nur Afiyah menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penulis menggunakan kualitatif.
3	Nita Novia Lestari, Sundarso dan Kismartini (2015) <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> ,	Implementasi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Kasus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)		Implementasi kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah tepat dan mencapai tujuan, sesuai target yang telah ditentukan, Faktor penghambat kurangnya koordinasi antara Provider dengan dinas terkait sehingga sering terjadi kesalahan teknis dalam proses penagihan.	Kesamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nita Novia menggunakan paradigma kebijakan publik dan teori Implementasi, sedangkan penulis menggunakan paradigma manajemen publik dan teori

	<i>Volume 4 Nomor 2</i>				analisis SWOT.
1	2	3	4	5	6
4	Rusdianto Sesung, Fredy Kurniawan, and Moh. Noor Al Azam (2019) <i>Journal of Physics, Conference Series</i> 1573/2020/ 012011	<i>Model of Organization and Determination of Tariffs in the Control of Justice, Expective and Efficient Telecommunicatio n Towers,</i>	Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori pendekatan konseptual	Pola perhitungan RPMT yang ideal adalah perhitungan berdasarkan Pasal 151 UU PDRD sebagaimana diperkuat oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 46/PUU- XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan alasan bahwa pengenaan tarif retribusi yang memberikan batas maksimum NJOP tanpa disertai dengan sistem perhitungan yang jelas tidak memberikan kepastian hukum yang akan menyebabkan ketidakadilan dalam penerapannya.	Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan, sama - sama membahas analisis perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi sedangkan perbedaannya, teori yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan teori pendekatan konseptual, sedangkan penulis menggunakan teori analisis SWOT.
5	Dede Hermawan, (2017) Dinamika Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.4 Nomor 2.	Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Oleh Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten	Teori yang digunakan, yaitu teori analisis pendekatan proses	Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik, meskipun memerlukan beberapa perbaikan. Hambatan yang ditemui dalam pemungutan retribusi menara telekomunikasi yaitu kurang tepatnya waktu pemungutan retribusi dengan jadwal yang telah ditetapkan. Masih adanya petugas yang kurang memiliki daya tanggap yang baik terhadap keluhan wajib	Kesamaan pada penelitian ini adalah objek penelitian dan metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan perbedaannya, yaitu teori yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan teori analisis pendekatan proses sedangkan penulis menggunakan teori analisis SWOT.

		Ciamis.		retribusi.	
1	2	3	4	5	6
6	Fikri Budi Aulia, Sungkono, Nurwiyanta, Kartinah, 2020, <i>Advances in Economics, Business and Management Research</i> , Volume 169	<i>Telecommunication Tower Retribution Contribution Against the Original Regional Income of Kulonprogo Regency (2015-2019)</i> .	Teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori <i>Tren Last Square</i>	ditemukan banyak kekurangan yang dapat mempengaruhi jalannya mekanisme penarikan dan jumlah penerimaan retribusi menara telekomunikasi yang memiliki berdampak pada peningkatan pendapatan dari PAD.	Kesamaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti sedangkan untuk perbedaannya, yaitu pada metode yang dilakukan oleh Fikri Budi menggunakan metode pengujian <i>Tren Last Square</i> dengan tingkat signifikan 5%, sedangkan penulis menggunakan analisis SWOT.
7	Ari Gunadi Palilu, Istas Pratomo, 2014, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.12 No.4	<i>Preliminary Study of the Planning of Required BTS in Buletin Pos dan Telekomunikasi</i> , Vol.12 No.4	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori perhitungan <i>path loss</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menara telekomunikasi membutuhkan analisis terhadap faktor utama yang berorientasi pada komunikasi dan telah memenuhi berbagai kebutuhan para pelanggan atau <i>customer</i> seluler dalam jangka waktu 5 tahun mendatang hingga tahun 2017. Untuk itu, pembangunan menara telekomunikasi ini tidak diperlukan lagi, namun hanya memerlukan rekonstruksi ulang berdasarkan petunjuk teknis dan persyaratan yang ada.	Kesamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang sama tentang menara telekomunikasi dan perbedaannya, yaitu metode penelitian yang digunakan oleh Ari Gunadi menggunakan perhitungan <i>path loss</i> , sedangkan penulis menggunakan metode analisis SWOT.
8	Afdal Suganda, Ririt Dwiputri Permatasari, Pratiwi, Ismail Yusuf	Sistem Informasi Pemantauan Retribusi pada Menara Telekomunikasi	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode <i>waterfall</i> dengan pemrograman	Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian tersebut, dalam rangka menunjang proses pengerjaan menara telekomunikasi, pihak Pemerintah Kota Batam	Kesamaan dalam penelitian ini, yaitu objek penelitian yang sama sedangkan untuk perbedaannya dalam penelitian tersebut terfokus pada pemantauan retribusi menara telekomunikasi sedangkan penulis

	Panessai, 2019,		php dan basis data mysql.	memerlukan seperangkat <i>software</i> supaya dapat	berfokus pada pencarian strategi untuk peningkatan retribusi
1	2	3	4	5	6
	<i>International Journal of Education, Science, Technology and Engineering</i> 2019, 2(2): 97-111			memberikan kemudahan dalam manajemen data menara telekomunikasi. <i>Software</i> yang dirancang dalam penelitian ini berupa aplikasi berbasis <i>waterfall</i> dengan bahasa pemrograman PHP dan <i>database mysql</i> .	pengendalian menara telekomunikasi.
9	Muhamad Mahfudz dan Wahyu Gendam Prakoso, 2019, Jurnal Teknik, Vol. 20, Nomor 2	Analisa Konvergensi Kelayakan Penetapan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Dalam Tinjauan Spasial Kota Bogor	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori analisis data spasial	Hasil survey pada penelitian di lapangan jika dibandingkan dengan data menara telekomunikasi yang didapatkan oleh peneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPSTP menunjukkan adanya selisih sekitar 16,6%. Artinya bahwa kemungkinan persentase tersebut tidak tercatat oleh DPMPSTP.	Kesamaan dalam penelitian ini pada objek penelitian, yaitu terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi namun ada perbedaan, yaitu pada proses analisis yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode analisis data spasial sedangkan penulis menggunakan analisis SWOT.
10	Uu Nurul Huda, 2020, <i>De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah</i> , Vol. 12, No. 1	<i>The Effect of Cancellation of Regional Regulations on Retribution Toward Regional Financial Regency In West Jawa</i>	teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori pendekatan yuridis empiris.	Peraturan Daerah terkait dengan retribusi yang dibatalkan akan berpengaruh terhadap menurunnya PAD yang dapat menjadi sumber keungan bagi setiap daerah. Hal ini akan berdampak pada hilangnya restribusi yang dapat mempengaruhi tingkat keefektifan maupun efisien dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya berdasarkan aspek yang	Kesamaan dalam penelitian ini sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan untuk perbedaannya, yaitu pada teori yang digunakan oleh penelitian tersebut, yaitu teori pendekatan yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan teori analisis SWOT.

				didukung melalui anggaran retribusi.	
1	2	3	4	5	6
11	Nurul Fithriyah, Imron Burhan, Veronika Sari Den ka, Jurnal Pabean Vol 4 No. 1 Jan 2022	Analisis Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori analisis data domain	Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan terkait tingkat kontribusi dari pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Maros pada tahun 2018 dan 2019 memiliki hasil persentase yang sama yaitu 0,14% dan pada tahun 2020 diperoleh persentase sebesar 0,16%. Berdasarkan hasil persentase tersebut, dapat dianalisis bahwa kriteria yang diperlukan untuk kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap PAD yang ada di Kabupaten Maros masih sangat kurang.	Kesamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian yang sama, yaitu kualitatif deskriptif sedangkan untuk perbedaannya, yaitu teknis analisis data yang digunakan oleh Nurul Fitriyah menggunakan analisis data domain sedangkan penulis menggunakan analisis SWOT.
12	M.Daud, Petra Paulus Tarigan, Vera Methalina Afma, 2014, Profesiensi, 2(1): 28-35	Evaluasi Menara Telekomunikasi Terpadu Dengan Menggunakan Analisis SWOT di Kota Batam	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori analisis SWOT	Belum tertata dengan baiknya seluruh menara yang ada di Kota Batam, masih banyaknya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penertiban menara Telekomunikasi di Kota Batam.	Kesamaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis SWOT, sedangkan Perbedaannya pada fokus pembahasan penelitian tersebut pada analisis tata letak keberadaan menara telekomunikasi sedangkan penulis menganalisis penerimaan retribusinya.
13	Daryanto Setiawan, 2018, Simbolika, Vol. 4 (1)	<i>Impact of Information Technology Development and Communication</i>	Penelitian ini, menggunakan teori <i>Alo liliweri</i> untuk mengetahui	Salah satu aspek kehidupan yang paling terpengaruh dengan perkembangan ini adalah aspek kebudayaan masyarakat yang sedikit demi	Kesamaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan teori <i>Alo liliweri</i> ,

		<i>on Culture</i>	dampak	sedikit mengalami pergeseran	sedangkan penulis menggunakan teori analisis SWOT.
1	2	3	4	5	6
14	Indrayati Galugu, Muh. Yusuf Abadi, Marsuki Iswandi, DINAMIKA Jurnal Ilmiah Teknik Mesin 2016, Vol. 8, No. 1,	Kajian Dampak Pengembangan BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) Terhadap Kondisi Wilayah dan Lingkungan Di Kota Kendari	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori analisis dampak kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hamper sejumlah responden memiliki penilaian tersendiri terhadap pembangunan menara telekomunikasi atau tower BTS yang berpengaruh pada persoalan lingkungan. Adapun dampak negatif dari pembangunan menara tersebut, khususnya bagi masyarakat setempat di Kota Kendari pada 3 kecamatan yaitu keresahan masyarakat terhadap risiko robohnya menara telekomunikasi.	Kesamaan dalam penelitian ini, yaitu pada objek penelitian pada menara telekomunikasi atau bisa disebut juga dengan BTS, untuk perbedaannya pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian <i>mixed method</i> sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
15	Serly Patu, 2015, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2,	Evaluasi Kebijakan Pembangunan Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori evaluasi kebijakan	Dimensi <i>Technical Feasibility</i> ; masih belum dilaksanakan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi serta belum dilakukan pelaporan kinerja pengelolaan dan pemantauan Lingkungan. Dimensi <i>Economy and financial possibility</i> ; masyarakat sudah dapat menikmati layanan telekomunikasi serta memberikan peningkatan PAD bagi pemerintah daerah namun penggunaan menara bersama belum optimal dilakukan oleh penyedia menara telekomunikasi.	Kesamaan dalam penelitian ini, yaitu metode yang digunakan kualitatif deskriptif serta objek penelitian pada menara telekomunikasi, sedangkan untuk perbedaannya penelitian tersebut menggunakan paradigma kebijakan publik dan teori evaluasi kebijakan sedangkan penulis menggunakan paradigma manajemen publik dan teori analisis SWOT.

1	2	3	4	5	6
16	Hartina Husein, 2021, Kupna Jurnal, Volume 2, Nomor 1.	Analisis Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi Menggunakan <i>Activity Based Costing</i> Tarif	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori <i>activity based costing</i> untuk mengkalkulasi tarif retribusi	Dari telusuran komponen biaya yang relevan, digunakan oleh pemda sebagai acuan dalam penyusunan perda retribusi menara telekomunikasi. Selain penggunaan aktivitas, pengukuran menggunakan variabel zonasi dan jarak tempuh juga diperlukan sebagai pertimbangan dalam penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pemda.	Kesamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian pada retribusi menara telekomunikasi kemudian metode yang digunakan kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya yaitu teori yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teori <i>activity based costing</i> untuk mengkalkulasi tarif retribusi sedangkan penulis menggunakan teori analisis SWOT.
17	Jamal Bake, Muh. Yusuf, Akbar Wahbi, 2022, Journal Publicuho, Volume 5, Nomor 4	Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah di Kota Kendari	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif dari Miles	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kota Kendari. Pertama, strategi intensifikasi dilakukan dengan cara memperbaiki regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan perizinan dalam melaksanakan suatu kebijakan Kedua, strategi ekstensifikasi dapat dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi untuk memperluas obyek retribusi baru serta merumuskan kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai bentuk kepastian hukum. Ketiga, strategi untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar	Kesamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif sedangkan perbedaannya pada teori, yaitu pada penelitian tersebut menggunakan sedangkan penulis menggunakan teori analisis SWOT.

				retribusi daerah.	
1	2	3	4	5	6
18	Evi Nilawati, 2019, Jurnal Maksipreneur, Volume 9, Nomor 1	Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori analisis SWOT.	Gunungkidul yaitu mencapai 11,37%. Peningkatan persentase pendapatan asli daerah ini karena adanya strategi khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan menyusun beberapa rencana aksi, antara lain mengkaji pengembangan potensi PAD, mengkaji Perda dan menyusun regulasi baru, menyusun SOP pemungutan maupun penarikan pajak retribusi, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan retribusi pajak.	Kesamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan teori analisis yang digunakan sama, yaitu kualitatif deskriptif dan analisis SWOT, sedangkan untuk perbedaannya, yaitu pada fokus penelitian yang dilakukan oleh Evi Nilawati menganalisis peningkatan PAD secara umum sedangkan penulis menganalisis peningkatan PAD melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
19	Nursafitra M., Muh. Nursadik, Muhammad Yunus, 2019, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP), Volume 5, Nomor 1	Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang	teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan teori intensifikasi dan sistem ekstensifikasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Enrekang melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan PAD. Strategi utama yang dilakukan Pemkab Enrekang sebagai bentuk peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui kepatuhan subjek pajak yaitu dengan menerapkan program intensifikasi. Penerapan program ini didasarkan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan personalia. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan program ekstensifikasi berupa	Kesamaan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada teori yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan teori intensifikasi dan sistem ekstensifikasi untuk mengukur strategi peningkatan PAD sedangkan penulis menggunakan analisis SWOT.

				penciptaan sumber-sumber pajak maupun retribusi baru.	
1	2	3	4	5	6
20	Mukhtar Hakim R., Ma'mun Sarma, Harianto, 2018, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Volume 10, Nomor 1	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas	Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori analisis SWOT.	Hasil yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuasi dan tingkat efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD di Kepulauan Anambas ini dipengaruhi oleh adanya strategi yang diterapkan, yaitu dengan meningkatkan manajemen pendapatan serta memaksimalkan potensi PAD.	Kesamaan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori analisis SWOT sedangkan untuk perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan Hakim menganalisis peningkatan PAD secara umum sedangkan penulis menganalisis peningkatan PAD melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan pada tabel 2.2. seluruhnya merupakan rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, namun terdapat tiga penelitian yang menjadi rujukan utama karena memiliki kemiripan pada permasalahan yang akan dikaji, yaitu pada penelitian pertama mengidentifikasi adanya 101 unit tower ilegal di Kota Pekanbaru, Riau, yang mengakibatkan kebocoran PAD dari sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, namun ada perbedaan

paradigma yang digunakan, yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan paradigma kebijakan publik dengan teori implementasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan paradigma manajemen publik dengan teori analisis SWOT.

Penelitian kedua yang menjadi rujukan utama mengidentifikasi masalah pada tahun 2013 kebelakang tidak pernah ada penargetan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri dan baru ada kebijakan penargetan di tahun 2013, yaitu sebesar 750 Juta pertahun sehingga Dishubkominfo dituntut untuk dapat melakukan penerimaan sesuai dengan target yang ditentukan. Dalam penelitian tersebut menggunakan paradigma kebijakan publik dan teori implementasi publik, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan, yaitu pada metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif, deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, namun ada perbedaan paradigma serta teori yang digunakan, yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan paradigma kebijakan publik dan teori implementasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan paradigma manajemen publik dan teori analisis SWOT.

Penelitian berikutnya mengidentifikasi masalah pada kebutuhan sarana telekomunikasi yang meningkat membuat Pemerintah Daerah Kulon Progo dilema, karena dengan meningkatnya perkembangan telekomunikasi berdampak pada bertambahnya pendirian menara, namun disisi lain merupakan peluang untuk

peningkatan PAD, hal ini membuat Pemerintah Kulon Progo harus tetap menjaga estetika penggunaan tata ruang agar tidak merusak sektor lain. Penelitian ini menggunakan teori *Trend Least Square*, untuk melakukan pengujian data pendapatan dari tahun 2015 s/d 2019 yang digunakan sebagai sampel serta metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu pada metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, sedangkan untuk perbedaannya, yaitu pada teori yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan model teori *Trend Least Square* sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori Analisis SWOT.

Penelitian terakhir yang menjadi rujukan, mengidentifikasi tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan tingkat efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD di Kepulauan Anambas ini dipengaruhi oleh adanya strategi yang diterapkan, yaitu dengan meningkatkan manajemen pendapatan serta memaksimalkan potensi PAD. Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan, yaitu metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta menggunakan teori analisis SWOT, namun ada perbedaan, yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada analisis peningkatan PAD secara umum

sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis peningkatan PAD melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Terjadinya penurunan target dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Cirebon di tahun 2019;
2. Adanya ketidakseimbangan antara penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di tahun 2020 dan 2021 dengan peningkatan jumlah menara telekomunikasi yang semakin tinggi;
3. Belum optimalnya strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

1.4. Rumusan Masalah

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada. Agar penelitian lebih jelas, terarah, dan tidak menyimpang maka perlu adanya perumusan masalah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
2. Menganalisis strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Memberikan rekomendasi berupa strategi yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan ilmiah berupa pemikiran dan bahan kajian dalam menambah gagasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosial dan ilmu politik;

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, dapat menganalisis terkait strategi, kebijakan, dan mekanisme retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.
- b. Bagi pihak lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa sumbangan pikiran dan bahan kajian untuk Universitas Diponegoro dalam menambah gagasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai kebijakan publik.
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Dinas Telekomunikasi dan Informatika dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan salah satu komponen dalam perumusan kebijakan, hal ini karena administrasi publik adalah bagian dari kegiatan organisasi dalam menentukan sasaran dan tujuan suatu kebijakan yang dilakukan secara obyektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan teori

yang dikemukakan oleh Henry (Mulyadi, 2016) bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dalam perjalanannya administrasi publik mengalami beberapa kali perubahan paradigma. Denhardt dan Denhardt membagi paradigma administrasi Negara atas tiga kelompok besar, yaitu paradigma *The Old Public Administration (OPA)*, *The New Public Management (NPM)* dan *The New Public Service (NPS)*. Menurut Denhardt dan Denhardt paradigma OPA dan NPM kurang relevan dalam menangani persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai (*inappropriate*) dengan administrasi Negara, sehingga perlu paradigma baru yang kemudian disebut sebagai NPS.

Dalam konsepnya (Pasolong, 2013), George Frederickson merumuskan enam model paradigma administrasi publik yang dijelaskan secara teoritis:

1. Paradigma Birokrasi klasik, fokus pada struktur organisasi dengan fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip adm/mnj. Lokusnya pada berbagai jenis organisasi pemerintah/swasta. Nilai yang ingin diwujudkanannya efisiensi, efektifitas, ekonomis, rasional;
2. Paradigma Birokrasi neo-klasik, fokus pada keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintah. Fokusnya pada proses pengambilan keputusan dengan penerapan ilmu perilaku, manajemen dan analisa sistem;
3. Paradigma Kelembagaan, fokus pada perilaku birokrasi yang dipandang sebagai organisasi yang kompleks. Salah satu perilaku birokrasi adalah dalam pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan inkremental;
4. Paradigma hubungan kemanusiaan, fokus pada dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek sosial. Bahwa keikutsertaan dalam pengambilan keputusan akan meminimalisir perbedaan, status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri, optimalisasi tingkat kepuasan;

5. Paradigma pilihan publik, fokus pada politik tentang pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh organisasi;
6. Paradigma administrasi publik baru, fokus meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain organisasi dapat berjalan ke arah mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal.

Kesimpulan yang dapat diambil dari paradigma administrasi publik saat ini, maka paradigma administrasi publik baru, merupakan paradigma yang mendekati kondisi saat ini di Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama mengenai penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Paradigma ini menegaskan tentang usaha pengorganisasian suatu unit atau lembaga organisasi untuk dapat berjalan secara maksimal mewujudkan pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

1.7.2. Manajemen Publik

Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk ilmu perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengorganisasian, maupun pengarahan dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan sejak awal. Tujuan dari sebuah lembaga atau perusahaan dapat terwujud dengan baik jika manajemennya dikelola secara optimal (Ristiani, 2020). Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (Gesi, et.al. 2019).

Menurut Handoko (Gesi, et.al, 2019) ada tiga alasan utama mengapa manajemen diperlukan, yaitu :

1. Manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai;

2. Manajemen juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang mempunyai kepentingan dalam organisasi;
3. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi.

Robbins dan Coulter (1999) (Taufiqurokhman & Evi, 2018) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.

1. Perencanaan mencakup pendefinisian tujuan, penetapan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan;
2. Pengorganisasian mencakup penentuan tugas apa saja yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkat mana keputusan harus dibuat;
3. Kepemimpinan meliputi kegiatan-kegiatan memotivasi bawahan, mengarahkan, menyeleksi saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan konflik;
4. Pengendalian meliputi pemantauan kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa semua orang mencapai apa yang telah direncanakan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang ada.

Dalam administrasi publik, manajemen atau pengelolaan pemerintahan merupakan faktor utama di dalam suatu organisasi atau lembaga perusahaan. Faktor utama tersebut dapat menjadi bentuk perwujudan upaya di berbagai pemerintahan dengan mencakup aspek-aspek kehidupan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Karlina et al. (2020), indikator-indikator manajemen publik yang diperlukan di lingkungan pemerintahan, antara lain :

- 1) Manajemen publik yang berfungsi sebagai aspek perencanaan dan pengawasan,
- 2) Manajemen publik yang berfungsi sebagai aspek rasionalitas maupun akuntabilitas masyarakat,
- 3) Manajemen publik yang berfungsi sebagai aspek privatisasi alternatif bagi pihak pemerintah dalam melayani publik,
- 4) Manajemen publik yang berfungsi sebagai pengelolaan aspek finansial yang dibutuhkan dan dikeluarkan,
- 5) Manajemen publik yang berfungsi sebagai aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi lebih produktif, terutama

dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (Karlina, 2020).

Beberapa teori diatas menggambarkan begitu pentingnya sebuah manajemen dalam suatu organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan visi dan misi organisasi perlu melakukan manajemen secara matang dan terarah, begitupun dalam fenomena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat kebutuhan masyarakat akan sarana teknologi tersebut meningkat, membuat industri teknologi semakin memperluas akses internetnya melalui pendirian menara telekomunikasi hingga ke pelosok desa, namun jika hal ini tidak dikendalikan atau di *manage* dengan baik oleh pemerintah, akan menimbulkan dampak buruk dan kerugian bagi lingkungan sekitar menara dan bagi pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan manajemen baik dalam sektor internal maupun eksternal secara baik agar dapat tersusunnya strategi kebijakan secara tepat dalam menyelesaikan segala permasalahan dan memanfaatkan peluang yang ada.

1.7.3. Manajemen Strategis

Manajemen strategi menurut Wheelen & Hunger (Yunus, 2016) merupakan rangkaian langkah, keputusan dan tindakan organisasi yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Manajemen strategi yang baik akan dapat membawa organisasi untuk dapat mengimplementasikan strateginya melalui perencanaan program, proses *budgeting*, sistem manajemen kinerja, perubahan pada struktur organisasi, serta manajemen program dan proyek

Menurut Riva'I (Yunus, 2016), proses manajemen strategi secara umum dapat dibagi menjadi tiga langkah pokok, yakni

- a. Perumusan strategi (*Formulating strategy*);
- b. Penerapan strategi (*implementing strategy*);
- c. Evaluasi (*evaluating*).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses manajemen strategis terdiri atas tiga tahap: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

(Muttaqin, 2021) mengungkapkan bahwa dalam mempraktikkan Manajemen Strategis, hal yang pertama dibutuhkan adalah melakukan semacam pemetaan atau analisis situasi, baik eksternal dan juga internal organisasi. Analisis lingkungan eksternal mencakup analisis lingkungan strategis untuk mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi sehingga mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi.

Menurut (Muttaqin, 2021) setidaknya ada tiga kategori utama yang diidentifikasi ketika melakukan analisis lingkungan eksternal, yaitu: (1) pemetaan kekuatan-kekuatan/tekanan dan tren yang biasanya dikategorikan sebagai aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum; (2) pemetaan pemilik sumber daya; dan (3) peta pesaing aktual atau potensial, pemangku kepentingan, serta kekuatan penting yang mempengaruhi persaingan dan kolaborasi.

Selain analisis eksternal, diperlukan juga analisis lingkungan internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk berbagai aspek dari organisasi yang dapat membantu dan menghambat pencapaian visi dan pemenuhan mandat organisasi. (Muttaqin, 2021) mengidentifikasinya melalui empat komponen yang perlu diperhatikan untuk membantu melakukan analisis internal organisasi, yaitu: (1) kekuatan organisasi; (2) kelemahan organisasi; (3) pertanyaan seputar visi dan misi; dan (4) kapasitas internal organisasi termasuk program kerja, SDM, manajemen dan kepemimpinan, sumber daya fisik, citra organisasi, dan lainnya).

(Yunus, 2016), mengemukakan bahwa *strategic management*, merupakan pengembangan dari *strategic planning* (perencanaan strategis). Prosesnya tidak hanya berkonsentrasi pada formulasi strategi, namun juga diperhatikan secara seksama proses implementasinya. Karena berdasarkan pengalaman dengan menggunakan *strategic planning* (perencanaan strategis), organisasi sering kali tidak mencapai tujuannya karena ternyata strategi yang diformulasikan tersebut tidak diimplementasikan secara efektif.

Perencanaan strategis adalah salah satu bagian integrasi dari konsep perencanaan atau *planning* yang juga termasuk dari fungsi manajemen atau pengelolaan. Bryson dalam (Permatasari, 2017) menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu bentuk upaya yang ditujukan untuk mengambil keputusan dan tindakan tertentu sehingga dapat membentuk suatu organisasi atau entitas lain dalam melakukan apa yang seharusnya dikerjakan dan alasan suatu organisasi melakukan hal tersebut. Perencanaan strategis berdasarkan pendapat

Lembaga Administrasi Negara dapat diartikan juga sebagai proses yang berkelanjutan secara terstruktur dan sistematis melalui pengambilan keputusan yang cukup berisiko dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir usaha-usaha yang diperlukan, serta melakukan pengukuran atau penilaian hasil melalui *feedback* yang telah terorganisasi dengan baik.

Menurut pendapat Hughes dalam (Permatasari, 2017) perencanaan strategis terdiri dari beberapa komponen penting, seperti berikut :

- a) Misi dan tujuan sesuai dengan pernyataan para pimpinan manajemen dengan lebih menekankan terhadap pemikiran strategis serta dikembangkan dengan target-target yang akan dicapai kedepannya.
- b) Analisis kondisi atau situasi lingkungan dengan melakukan identifikasi, penilaian, dan antisipasi berbagai faktor eksternal maupun faktor yang harus dipertimbangkan sebagai bahan untuk merumuskan strategi di suatu lembaga atau organisasi.
- c) Melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan dan pengukuran kualitas sumber daya internal dengan mengevaluasi kekuatan maupun kelemahan dari suatu lembaga atau organisasi, yang kemudian dapat dipertimbangkan berdasarkan penyusunan dan perumusan perencanaan strategis.
- d) Merumuskan dan memilih strategi yang tepat untuk dapat dieksekusi sesuai dengan target dan tujuan yang ingin diwujudkan.
- e) Memberikan pengawasan dan monitoring secara khusus pada pelaksanaan rencana strategis agar dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Adapun beberapa langkah untuk menyusun perencanaan strategis menurut pendapat Bryson dalam (Permatasari, 2017), antara lain :

- 1) Memberikan kesepakatan pada proses perencanaan strategis.
- 2) Melakukan identifikasi terhadap mandat dan kandidat organisasi.
- 3) Menunjukkan misi maupun nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam suatu organisasi secara detail dan jelas.
- 4) Memberikan penilaian lingkungan eksternal dengan berdasarkan peluang maupun ancaman yang harus dihadapi.
- 5) Memberikan penilaian lingkungan internal dengan berdasarkan kekuatan maupun kelemahan yang harus dihadapi.
- 6) Melakukan identifikasi dan analisis terhadap isu strategis yang harus dihadapi oleh organisasi.

- 7) Melaksanakan perumusan strategis untuk pengelolaan isu-isu terkait.
- 8) Menciptakan visi organisasi secara efektif sesuai dengan target yang akan dicapai dan diwujudkan.

Whittaker dalam (Permatasari, 2017) juga menyampaikan bahwa terdapat 10 langkah perencanaan strategis yang harus dilakukan, yaitu *Mission, Vision, Value, Internal Analysis, External Analysis, Assumption, Strategic Analysis and Choice, Critical Success Factors, Goals, Corporate Objectives and Strategy*.

1.7.4. Analisis Strategi (SWOT)

Strategi menurut (Tjiptono, 2006) berasal dari istilah *strategia* yang merupakan bahasa Yunani yang berarti suatu ilmu agar menjadi jenderal. Dalam arti lain, strategi dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang diperlukan untuk penggunaan maupun pembagian dalam kekuatan militer di berbagai daerah tertentu demi mencapai tujuan bersama. Kemudian berdasarkan pendapat (Pearce & B.Robinson, 2008), strategi merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada masa mendatang dalam rangka melakukan interaksi dengan memperhatikan persaingan sebagai pencapaian tujuan bersama. Dalam suatu lembaga atau organisasi, strategi dapat dikembangkan dengan menganalisis kebijakan ataupun upaya yang akan dilakukan sesuai dengan target dan tujuan masing-masing organisasi.

Analisis strategi yang paling sering digunakan oleh organisasi-organisasi, baik di lingkungan swasta ataupun pemerintahan yaitu analisis strategi SWOT. Analisis SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Threats* (ancaman). Analisis SWOT dapat diartikan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor

penting yang tersistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk melakukan penyusunan dan perumusan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat mengoptimalkan kekuatan maupun peluang yang ada, namun juga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman yang datang.

Analisis SWOT pada umumnya menjadi dasar bahwa strategi yang efektif dan efisien dapat mengoptimalkan aspek kekuatan dan aspek peluang yang ada serta strategi yang dijalankan dalam meminimalisir kelemahan maupun ancaman yang kemungkinan terjadi. Apabila strategis analisis SWOT ini dapat diterapkan secara maksimal di berbagai organisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan, maka pemikiran strategis ini dapat berpengaruh besar terhadap organisasi. Adanya pengaruh besar ini sebagai bentuk rancangan dari penyusunan maupun perumusan strategi yang telah berhasil dijalankan melalui analisis lingkungan secara internal maupun eksternal dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Selain itu, strategi analisis SWOT dapat mengidentifikasi peluang maupun ancaman yang ada dalam suatu organisasi, sehingga pihak organisasi dapat menyusun langkah-langkah strategis yang sesuai dengan target maupun tujuan yang akan dicapai (Astuti, A. M. I., & Ratnawati, 2020).

1.7.5. Retribusi Daerah

A) Karakteristik Retribusi Daerah

Menurut pendapat Siahaan (Astoria, 2015), terdapat beberapa karakteristik pada retribusi, antara lain :

- 1) Retribusi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Hasil penerimaan retribusi selanjutnya masuk ke kas pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang wajib membayar retribusi memperoleh kontra prestasi atau semacam imbalan dari pemerintah daerah atas jasa pembayaran yang telah diberikannya.
- 4) Retribusi terutang dapat dilakukan jika terdapat jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan kemudian diperuntukkan bagi kepentingan pribadi atau badan tertentu.
- 5) Sanksi yang diberikan pada retribusi merupakan sanksi berdasarkan aspek ekonomis yang berarti bahwa apabila pihak wajib retribusi tidak melakukan pembayaran retribusi, maka pihak tersebut tidak akan mendapatkan jasa yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang (atau yang dapat disingkat dengan UU) No. 28 Tahun 2009 dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pungutan daerah terhadap masyarakat untuk membayarkan jasa atau perizinan tertentu secara khusus yang telah disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan pribadi ataupun badan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil manajemen kekayaan milik daerah yang sudah dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berdasarkan regulasi tersebut, retribusi daerah dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut (Astheria, 2015).

- 1) Jasa Umum, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 2) Jasa Usaha, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi

terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah

- 3) Perizinan Tertentu, meliputi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

B) Menara Telekomunikasi

Telekomunikasi dapat didefinisikan sebagai faktor utama yang dapat menunjang maupun meningkatkan persaingan secara ekonomis di suatu negara. Telekomunikasi ini dapat berperan dalam rangka meningkatkan pendidikan maupun hubungan antar negara (Suganda, 2019). (Palilu & I.Pratomo, 2014) menjelaskan bahwa Menara Telekomunikasi atau biasa disebut menara *Base Transceiver Station (BTS)* merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Lebih lanjut (Palilu & I.Pratomo, 2014) juga mengatakan bahwa Menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara.

Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan secara terus-menerus merupakan salah satu bentuk dari majunya teknologi namun dalam pengembangannya harus memperhatikan faktor-faktor tertentu seperti kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan, lingkungan dan estetika ruang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh (Suganda, 2019) dalam konsep perencanaan melalui proses pembangunan menara telekomunikasi atau tower BTS

dengan memperhatikan persyaratan atau kriteria umum, antara lain kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan, lingkungan dan estetika ruang.

C) Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, pengendalian menara telekomunikasi merupakan suatu bentuk penerapan strategi kebijakan dengan cara mengawasi, melakukan pengecekan, dan memantau atau memonitoring terhadap perizinan menara telekomunikasi, berdasarkan kondisi secara fisik dari menara tersebut, potensi atas didirikannya menara telekomunikasi, dan risiko yang ditimbulkan atas dibangunnya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek-aspek seperti, tata kelola ruang, keamanan, serta kepentingan publik.

(Sudarti, 2016) orientasi pengendalian menara telekomunikasi adalah untuk mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. (Sesung, R. et.al. 2020) Pengendalian menara telekomunikasi adalah penggunaan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

D) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(Sesung, R. et.al, 2020) mengatakan bahwa pendapatan yang sah adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, maupun dari

daerah lain yang dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan, ruang, pemanfaatan, dan pemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu dalam rangka melindungi kepentingan publik dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Fithriyah et.al (2022) menjelaskan ciri-ciri retribusi daerah antara lain :

1. Pembayaran dipungut oleh pihak pemerintah daerah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembayaran retribusi dapat dipungut jika terdapat jasa tertentu yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah daerah dan kemudian digunakan oleh suatu lembaga pemerintah;
3. Pihak wajib retribusi daerah memperoleh imbalan secara langsung oleh pihak Pemerintah Daerah terhadap pembayaran retribusi yang dilakukan;
4. Pihak wajib retribusi daerah yang belum membayar atau tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran retribusi daerah dikenai sanksi secara ekonomis, yaitu apabila tidak membayar retribusi tersebut, maka selanjutnya tidak mendapatkan jasa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
5. Hasil penerimaan atau hasil yang diterima dari retribusi daerah kemudian disetorkan kepada kas daerah.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi menurut (Siahaan, 2013), yaitu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Retribusi ini tergolong kedalam jenis retribusi jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Lebih lanjut menurut Fithriyah et.al.,

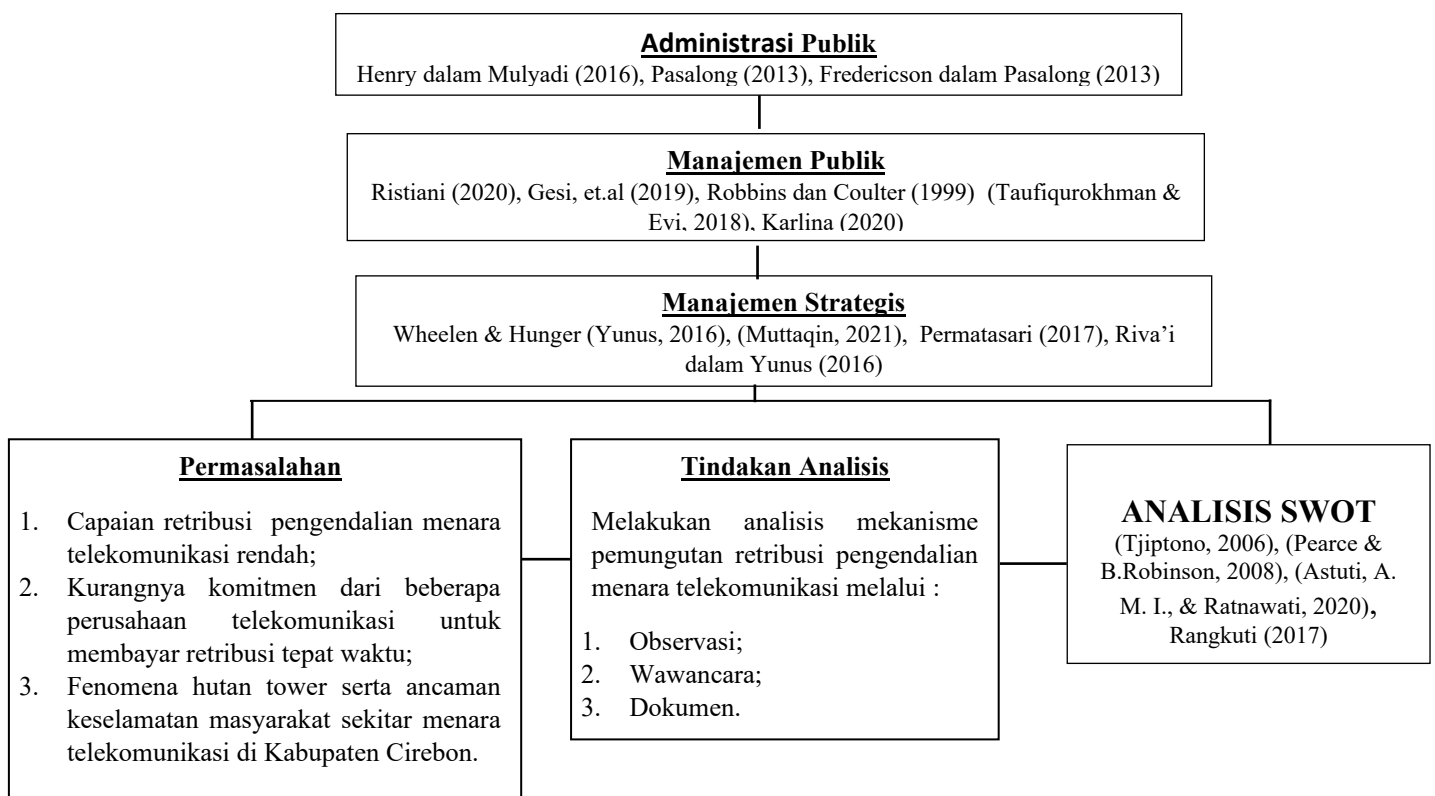
(2022), retribusi pengendalian menara telekomunikasi diinterpretasikan sebagai suatu objek dalam proses retribusi daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

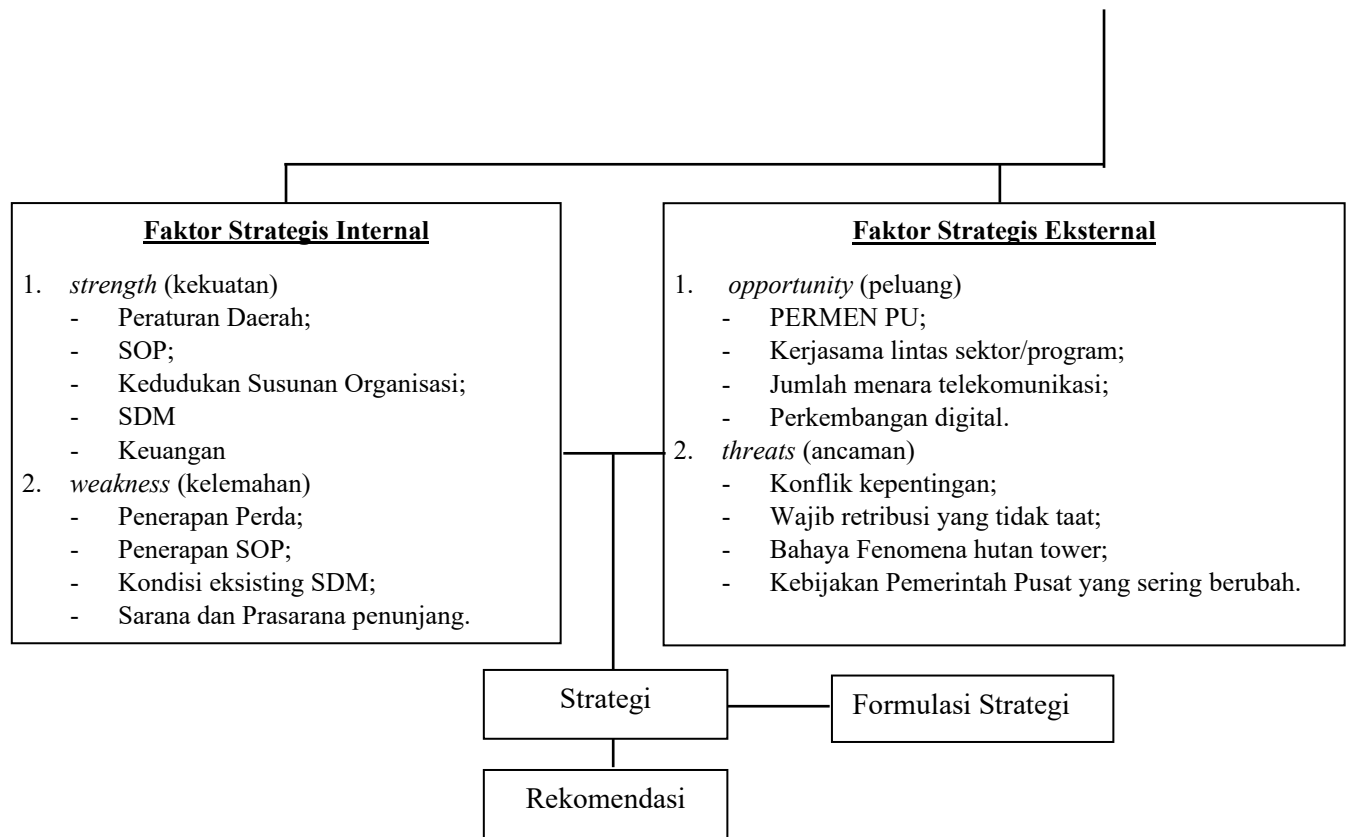
Dengan semakin meningkatnya usaha di bidang telekomunikasi yang sejalan dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan teknologi telah membuka pikiran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan hal tersebut. Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi atas jasa umum pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan dengan cara pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

1.8. Kerangka Pemikiran

Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Kerangka Berpikir Teoritis





1.9. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Retribusi ini tergolong kedalam jenis retribusi jasa umum (Siahaan, 2013). Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diinterpretasikan sebagai suatu objek dalam proses	1. Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	1. Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 2. Tata cara perhitungan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi; 3. Kondisi eksisting strategi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;

retribusi daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fithriyah et.al., (2022).	2. Strategi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	1. Penentuan faktor strategis internal; 2. Penentuan faktor strategis eksternal.
--	---	---

1.9.1. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menurut (Nurul Fitriyah, 2019) Pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terdiri dari dua kategori, antara lain:

1. Masa retribusi, yaitu jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama satu tahun;
2. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kondisi eksisting mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017, yaitu :

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD (Surat Tagihan retribusi daerah);

3. Penetapan besaran tarif retribusi berdasarkan frekuensi kunjungan dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dihitung dari honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor dikalikan maksimal tiga kali kunjungan sesuai dengan letak zonasi menara.

1.9.2. Strategi Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Strategi pemungutan dalam operasional konsep ini merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis dalam menentukan strategi baru yang ditawarkan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini yang didasarkan pada pengamatan kondisi strategi eksisiting Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Analisis yang digunakan adalah metode SWOT, yaitu meliputi matrik faktor strategi secara eksternal, matrik faktor strategi secara internal, dan matrik profil secara kompetitif. Pertama, matrik faktor strategi secara eksternal dapat ditentukan melalui proses penyusunan *External Strategic Factors Analysis Summary* atau yang biasa dikenal dengan *EFAS*. Kedua, matrik faktor strategi secara internal dapat ditentukan melalui proses penyusunan *Internal Strategic Factors Analysis Summary* atau yang biasa dikenal dengan *IFAS*. Ketiga, analisis hasil penelitian kemudian dapat diproses setelah beberapa faktor strategis ditentukan melalui *EFAS* dan *IFAS*, sehingga dapat disusun matrik profil secara kompetitif melalui analisis SWOT seperti pada tabel 1.4.

Tabel 1. 5
Matrik Analisis SWOT

<i>IFAS</i>	STRENGTHS	WEAKNESSES
-------------	-----------	------------

EFAS		
OPPORTUNITIES	STRATEGI-SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI-WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS	STRATEGI-ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI-WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Satyarini dan Palaesangi (2012)

A. Faktor Strategis Internal

Setelah faktor-faktor strategis internal dalam organisasi telah diidentifikasi maka tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka kekuatan dan kelemahan sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Cirebon, adapun faktor strategi tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. 6
Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)

No	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (<i>Strength</i>)				
1	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten			

	Cirebon.			
2	Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) yang jelas.			
3	Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil.			
4	Struktur organisasi pengelola retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang jelas.			
5	Kemampuan keuangan untuk mengelola administrasi.			
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
1	Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.			
2	Pelaksanaan penerapan SOP.			
3	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi formasi kebutuhan pegawai.			
4	Keterbatasan kemampuan keuangan untuk operasional penarikan retribusi.			
5	Sarana dan prasarana penunjang operasional penarikan retribusi.			
Total				

B. Faktor Strategis Eksternal

Faktor strategis internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan maka pada faktor eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman, adapun hasil identifikasi faktor eksternal termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 7
Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)

No	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
Peluang (<i>Opportunities</i>)				
1	Kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi			
2	Kerjasama lintas sektoral			
3	Kerjasama lintas program			
4	Dukungan masyarakat sekitar objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi			
5	Perkembangan dunia digital dan teknologi informasi.			
Ancaman (<i>Threats</i>)				
1	Tuntutan terhadap mutu pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi			
2	Kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku			
3	Ancaman fenomena hutan tower yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.			
4	Peraturan atau kebijakan pemerintah pusat yang dapat berubah-ubah sehingga memungkinkan adanya pencabutan atau peniadaan pemungutan terhadap objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi.			
Total				

1.10. Metode Penelitian

Penelitian menurut (Sumadi, 2010) penelitian adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu, ada juga pendapat lain yang dipaparkan oleh

(Arikunto, 2010), penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Dalam kegiatan penelitian perlu digunakan metode-metode tertentu untuk dapat mempermudah pencapaian tujuan penelitian, serta hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dikemukakan oleh Bahm yang dikutip dari (Masyhuri dan M. Zainudin, 2009), bahwa esensi dari sebuah pengetahuan adalah metode. Setiap pengetahuan memiliki metodenya sendiri sesuai dengan permasalahannya.

Dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang peluang dan tantangan keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

Penelitian deskriptif menurut (Sumadi, 2010), merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Usman & Akbar., 2014) mengemukakan bahwa:

“penelitian dengan menggunakan metode deskriptif merupakan uraian kata-kata menurut pendapat responden, yang kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak), direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat)”.

Uraian dan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan, maka penulis berkeinginan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif, karena metode ini

dianggap sangat relevan dan mampu memberikan penyelesaian serta memudahkan penulis dalam melakukan temuan-temuan terkait objek penelitian, serta memudahkan dalam melakukan pengumpulan data secara objektif dan valid yang dapat dijadikan acuan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada saat melakukan penelitian. Selain itu metode ini dianggap sangat sesuai dalam penelitian yang akan dilakukan, karena bersifat menggambarkan baik dari objek yang akan diteliti ataupun dari kejadian-kejadian yang ditemukan dalam proses penelitian.

Metode penelitian deskriptif dianggap mampu menggambarkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Cirebon mencakup masalah strategi implementasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon Dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan atas keberadaan menara telekomunikasi yang semakin menjamur.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Cirebon, penulis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait peluang dan tantangan keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, hal ini dimungkinkan agar masalah-masalah yang sudah dirumuskan terkait hal tersebut dapat terjawab secara obyektif dengan keadaan sebenarnya dan untuk keakuratan penelitian penulis mencoba menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhi dan lain sebagainya.

1.10.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu metode penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi dan memahami makna yang diasumsikan bersumber dari peristiwa atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Dalam proses penelitian kualitatif ini, tentunya melibatkan berbagai upaya yang cukup strategis dan urgen, seperti misalnya mengusulkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa yang terjadi, tahapan prosedur yang dilakukan, pengumpulan data secara spesifik dari responden ataupun partisipan, penjelasan terkait dengan analisis hasil data yang telah dikumpulkan secara induktif, baik dari tema spesifik ke tema umum, serta penafsiran dan penginterpretasian makna data. Tahapan laporan akhir yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mempunyai struktur ataupun kerangka yang bersifat fleksibel. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai pihak manapun yang terlibat dalam metode kualitatif ini seharusnya dapat mengimplementasikan cara berfikir secara induktif, terfokus pada makna individual, serta menerjemahkan kompleksitas atau kelengkapan suatu peristiwa.

Penelitian dengan tipe kualitatif ini berorientasi pada deskripsi atau penggambaran peristiwa sosial dan kemasyarakatan yang sedang terjadi. Hal ini berarti bahwa para ahli atau peneliti yang menggunakan metode kualitatif ini, harus dapat melalui tahap eksplorasi dari berbagai persoalan peristiwa sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan dan ditujukan untuk generalisasi sampel yang bersifat purposif saja, namun

penggunaan sampel acak yang sebenarnya tidak diperlukan juga tidak dilarang untuk digunakan. Hal ini dapat disebabkan karena apabila tidak ada generalisasi, maka dalam penelitian kualitatif, istilah atau kata populasi tidak terlalu diperlukan. Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, suatu riset dapat dikatakan sebagai ilmiah apabila secara konsisten digunakan dengan paradigma atau pendekatan yang melandasinya, bahkan dalam analisis penelitian tidak menggunakan perhitungan secara matematis (Manurung, 2022).

Pendekatan kualitatif juga didasarkan pada post-positivistik yang digunakan dalam meneliti kondisi suatu objek secara alamiah, hal ini merupakan kebalikan dari eksperimen, selain itu juga mendasarkan bahwa peneliti merupakan instrument kunci dari suatu penelitian. Metode kualitatif akan memberikan perlakuan apa adanya dan secara terbuka, tanpa adanya manipulasi sehingga data yang diberikan benar-benar data yang akurat. Selain itu, metode kualitatif dilakukan untuk menghasilkan sebuah kajian yang lengkap, rinci, transparan, spesifik, dan mendalam (Anggito, A., & Setiawan, 2018).

Melalui tipe penelitian kualitatif ini, maka peneliti dapat mengidentifikasi objek penelitian terkait dengan studi kasus retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk melakukan identifikasi tersebut, peneliti dapat mengusulkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi? serta pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait kepada narasumber yang menjadi informan. Dengan tipe penelitian kualitatif, peneliti juga dapat melakukan pengumpulan data secara

spesifik dari responden ataupun informan, baik melalui kegiatan pembagian kuisioner maupun wawancara. Setelah memperoleh berbagai data, melalui penelitian kualitatif dapat membantu peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasi hasil data yang diperoleh secara deskriptif.

1.10.2. Ruang Lingkup/Fokus

Penelitian ini difokuskan pada strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan jumlah PAD di Kabupaten Cirebon. Peningkatan jumlah PAD di Kabupaten Cirebon ini dapat dilaksanakan melalui proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon pada setiap retribusi. Apalagi pembangunan menara telekomunikasi ini sudah semakin meluas di beberapa titik wilayah Kabupaten Cirebon. Untuk melakukan strategi tertentu, peneliti melakukan analisis terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemungutan retribusi dalam pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti juga perlu melakukan analisis kebijakan pada mekanisme retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Perda Kabupaten Cirebon No. 8 Tahun 2011. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan PAD.

1.10.3. Fenomena Penelitian

Tabel 1.8
Operasionalisasi Konsep Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian
1.	Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	1. Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.	1. Penerapan Perda terkait pengendalian menara telekomunikasi; 2. Penerapan SOP serta sanksi.
		2. Tata cara perhitungan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.	1. Penerapan formulasi perhitungan; 2. Pencapaian target dan realisasi penerimaan retribusi.
		3. Kondisi eksisting strategi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;	1. Penerapan strategi melalui penguatan regulasi; 2. Penerapan strategi melalui penguatan SDM; 3. Strategi peningkatan penerimaan melalui pengembangan menara telekomunikasi.
2.	Strategi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	1. Penentuan faktor strategis internal;	1. Penentuan faktor kekuatan; 2. Penentuan Faktor Kelemahan.
		2. Penentuan faktor strategis eksternal.	1. Penentuan faktor peluang; 2. Penentuan faktor ancaman.

Fenomena hutan tower yang saat ini mengancam stabilitas sosial dan lingkungan di Kabupaten Cirebon nampaknya semakin nyata dan tidak dapat dihindari, hal tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi yang

memaksa keberadaan menara telekomunikasi harus ada dan berkembang, namun hal tersebut bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Keberadaan menara telekomunikasi pada dasarnya dapat ditertibkan dan dapat dikendalikan.

Pengendalian menara telekomunikasi menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon No. 8 Tahun 2011 dapat diinterpretasikan sebagai salah satu kebijakan untuk mengawasi, mengendalikan, memantau, maupun memonitoring perizinan pada menara telekomunikasi, baik secara fisik, pemanfaatan potensi, serta kemungkinan munculnya gangguan terhadap didirikannya menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan beberapa aspek, seperti tata ruang, keamanan, dan kepentingan publik. Berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon tersebut, pihak yang berperan untuk melaksanakan tugas pokok pengendalian menara telekomunikasi ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pembangunan maupun pengoperasian menara telekomunikasi ini dilaksanakan secara bertahap dan berkala sesuai dengan rencana induk menara bersama dengan telekomunikasi. Pada Pasal 2 Perda Kabupaten Cirebon No. 8 Tahun 2011, telah dijelaskan bahwa rencana induk menara bersama dengan telekomunikasi dapat digunakan untuk melakukan pengarahan, penjagaan, maupun jaminan supaya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan dan kemudian dioperasikan secara sistematis, baik didasarkan pada orientasi masa depan, secara terintegrasi, dan memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak.

Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melakukan pemungutan retribusi dalam

pengendalian menara telekomunikasi di 568 titik menara yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon terdiri dari :

Tabel 1. 9
Letak Koordinat Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon

No	Lokasi Menara	Jumlah	%
1	Zona I (Pusat Kota)	252	44%
2	Zona II (Pinggiran Kota)	139	24%
3	Zona III (Jauh dari Pusat Kota)	177	32%
Jumlah		581	100%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

Pemungutan retribusi ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Cirebon dengan jumlah tarif yang sesuai pada tingkat penggunaannya. Namun hingga saat ini, pemungutan retribusi pada pengendalian menara telekomunikasi ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh instansi terkait. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor penghambat, seperti banyaknya Provider yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran retribusi sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Retribusi (SKR) namun tetap saja belum melakukan pembayaran, sehingga belum ada pemasukan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon di tahun berjalan. Dengan demikian, para wajib retribusi belum memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Elyse, 2015).

Adanya faktor penghambat seperti ini, membuat para *stakeholder* Kabupaten Cirebon, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon perlu menciptakan strategi untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Cirebon. Ditambah dengan jumlah menara telekomunikasi yang dibangun di beberapa titik di Kabupaten Cirebon semakin meningkat. Peningkatan jumlah

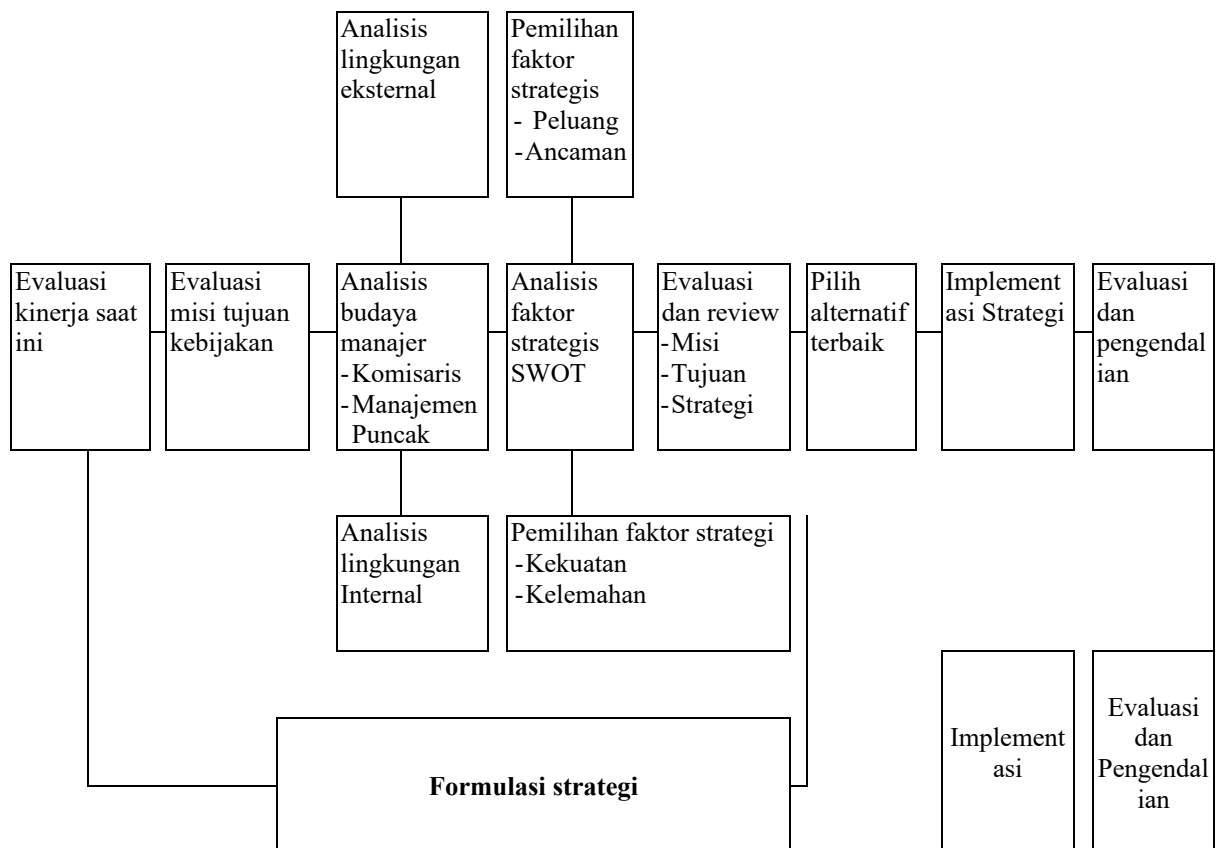
menara telekomunikasi ini dilandasi atas adanya orientasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang operator seluler dalam meningkatkan kualitas maupun kapasitas pelayanannya. Dalam melakukan perluasan titik pembangunan menara telekomunikasi ini, seharusnya lebih memperhatikan aspek-aspek lingkungan, terutama aspek keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar menara telekomunikasi tersebut.

Aspek keamanan dalam pembangunan menara telekomunikasi ini menjadi salah satu hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan karena risiko yang ditimbulkan sangat besar ketika operator telekomunikasi tersebut dapat tumbang sewaktu-waktu. Dalam hal ini, dapat disebut dengan ancaman hutan tower. Maka dari itu, dapat mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar menara telekomunikasi yang sudah dibangun. Hal ini dikarenakan lokasi pembangunan operator telekomunikasi berada di tengah-tengah wilayah permukiman masyarakat agar dapat memberikan kemudahan akses internet bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon secara khusus (Soviani, A., Ngodimo, N., & Ispriyarso, 2019). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyusun dan menciptakan strategi-strategi baru untuk meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon dengan meminimalisir terjadinya ancaman hutan tower bagi masyarakat setempat.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kelembagaan melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threats*) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan menentukan alternatif kebijakan secara realistis agar dapat diterapkan. Menurut (Rangkuti,

2017) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada :

Gambar 1. 2
Diagram Proses Pengambilan Keputusan Strategis



1.10.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi di lapangan atau dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan panduan pembagian kuisioner atau angket. Data

sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan dalam bentuk sejumlah keterangan atau informasi melalui dokumen-dokumen, seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dikaji (Arif et.al., 2017).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a) Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi secara langsung yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Cirebon, wawancara kepada beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti, dan dokumentasi terkait objek-objek yang relevan dengan penelitian ini. Adapun kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- b) Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber bacaan, baik melalui buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan.

1.10.5. Pemilihan Informan

Dalam teknik wawancara atau *interview* yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pertama, pemilihan informan berdasarkan tingkat kepentingan informan dengan objek penelitian yang ingin dikaji. Kedua, pemilihan informan berdasarkan keterkaitan dari jabatan atau posisi yang dimiliki oleh informan tersebut dengan objek penelitian yang ingin dikaji. Ketiga, pemilihan informan berdasarkan kompetensi atau bidang yang dimiliki oleh informan yang relevan dengan objek penelitian yang ingin dikaji. Kriteria-kriteria pada penelitian ini dapat menjadi

dasar pemilihan informan oleh peneliti, sehingga peneliti mendapatkan informasi penting terkait dengan objek penelitian yang dikaji.

Adapun informan yang akan peneliti wawancarai diantaranya :

- a. Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- b. Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Kepala Bidang Aplikasi Telematika pada Dinas Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- d. Kepala Seksi Teknologi dan Informasi pada Dinas Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- e. Beberapa wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi atau Provider;
- f. Beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar tower atau menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

1.10.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (Nasution, 2016) dapat didefinisikan sebagai alat bantu yang telah dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data secara terstruktur dan objektif. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun instrumen pada penelitian ini, antara lain :

- 1) Melakukan identifikasi terhadap variabel-variabel yang dikaji.
- 2) Mendeskripsikan variabel dalam bentuk dimensi-dimensi penelitian.
- 3) Menentukan indikator pada setiap dimensi.
- 4) Melakukan perumusan pada item-item pernyataan pada instrumen.

5) Petunjuk dalam mengisi instrumen penelitian.

Instrumen dalam penelitian ini dapat berupa hasil wawancara, hasil observasi dalam bentuk angket atau kuisioner, dan dokumentasi. Instrumen penelitian melalui pengisian kuisioner dapat ditentukan berdasarkan skala *likert* dengan poin yang berkisar antara 1-4. Poin 1 artinya sangat tidak setuju, poin 2 berarti sangat tidak setuju, poin 3 berarti setuju, poin 4 berarti sangat setuju.

1.10.7. Teknik Pengumpulan Data

(Sarwono, 2006) menyatakan bahwa apabila peneliti menggunakan metode pendekatan secara kualitatif, maka peneliti tersebut akan melakukan observasi ataupun pengamatan yang terlibat secara langsung melalui riset partisipatori. Secara praktik, peneliti akan melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen, foto atau publikasi, maupun artefak yang ada. Dalam metode pendekatan kualitatif, peneliti juga melakukan *interview* atau wawancara kepada beberapa narasumber. Teknik *interview* atau wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka.

Dengan mengarah pada metode tersebut maka peneliti dapat mengumpulkan berbagai data dengan tahapan berikut ini :

1. Metode Observasi

Menurut (Bungin, 2009), metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Menurut (Riduwan, 2011), Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dirasa sangat perlu dilakukan dalam sebuah penelitian,

karena untuk mengetahui suatu aktivitas, atau membandingkan suatu keadaan yang diharapkan dengan keadaan sebenarnya perlu dilakukan observasi atau pengamatan terhadap objek untuk mengungkap serta membaca permasalahan yang terjadi terhadap objek yang diteliti.

2. Metode Interview

(Arikunto, 2010) mengatakan bahwa *interview* atau wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dialog antara pihak yang memberikan pertanyaan (pewawancara) dengan pihak yang diwawancarai (narasumber atau informan) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara juga dapat diartikan berdasarkan pendapat dari (Bungin, 2009) sebagai suatu proses untuk mendapatkan keterangan atau informasi dalam kegiatan penelitian melalui tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan informan atau narasumber dapat dilakukan tanpa atau dengan menggunakan pedoman wawancara serta pewawancara berhubungan langsung dengan kehidupan sosial.

(Usman & Akbar., 2014), wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer); pelengkap teknik pengumpulan lainnya; menguji hasil pengumpulan data lainnya. Melalui interview ini diharapkan penulis dapat banyak memperoleh informasi yang terkait dengan judul laporan sehingga dapat menambah pemantapan dan keakuratan fakta temuan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan seluruh bahan dalam bentuk tulisan ataupun gambar yang berupa

data prosedur pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta realisasi penerimaan retribusi, adapun menurut (Riduwan, 2011), dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relavan penelitian.

1.10.8. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses penelitian, dari analisa inilah akan terlihat seberapa besarnya manfaat dari sebuah data, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Menurut (Nazir, 2013), analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan penelitian.

(Sarwono, 2006) mengemukakan bahwa terdapat model atau desain penelitian lain yang dapat dilakukan untuk menganalisis data kualitatif, yaitu dengan cara : 1) Analisis Domain, 2) Analisis Taksonomi, 3) Analisis Komponensial, 4) Analisis Tema Kultural dan 5) Analisis Komparasi Konstan. Sejalan dengan teori (Sarwono, 2006), (Sugiyono, 2014) menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan melalui analisis domain. Menurut Sugiyono, analisis domain adalah tahap pertama yang perlu dilakukan pada penelitian kualitatif yang kemudian dilanjutkan dengan analisis taksonomi yang bertujuan untuk menentukan domain-domain yang dipilih dengan penjabaran dan deskripsi secara lebih detail. Tahap berikutnya yaitu dengan analisis komponensial dengan menentukan perbedaan secara lebih spesifik di setiap

rincian penelitian yang diperoleh dari analisis taksonomi. Tahap terakhir yaitu analisis tema dapat dilakukan dengan menentukan hubungan antara domain yang satu dengan lainnya serta kemudian dilakukan analisis terkait hubungan secara keseluruhan, yang selanjutnya dapat dirumuskan melalui tema ataupun judul penelitian yang sedang dikaji.

Dalam langkah analisis data yang dilakukan oleh penulis merujuk pada teori Sarwono dan Sugiyono yaitu dengan beberapa langkah yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan analisis domain untuk memperoleh gambaran umum tentang peluang dan tantangan keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon dengan cara mencari data melalui DISKOMINFO Kabupaten Cirebon terkait perkembangan keberadaan menara telekomunikasi dan perkembangan kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon untuk menjawab fokus penelitian;
2. Melakukan transkrip data yang telah diperoleh dan dijabarkan serta dirinci secara detail;
3. Melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan mencari dan menjabarkan setiap perbedaan yang ditemukan dari data tersebut secara spesifik dan terinci;
4. Setelah data terkumpul dan dilakukan analisa maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah menarik kesimpulan dengan mencari kesesuaian antara data yang telah dianalisis dengan tema yang diangkat.

Menurut Miles and Huberman (1984) yang dikutip oleh (Sugiyono, 2014), aktivitas yang perlu dilakukan pada tahap analisis data kualitatif yaitu melalui

komunikasi yang terjalin secara interaktif dan berlangsung secara kontinu hingga selesai, sehingga datanya cukup jenuh. Aktivitas-aktivitas pada analisis data ini, antara lain data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data *Reduction* atau Reduksi Data

Data yang didapat dari hasil observasi lapangan dengan jumlah data yang banyak, sehingga diperlukan catatan atau poin-poin penting agar lebih teliti dan detail. Reduksi data ini menjadi suatu proses untuk berfikir lebih sensitif, sehingga membutuhkan kecerdasan maupun keluasan wawasan ataupun pemahaman pengetahuan yang tinggi.

2. Data *Display* atau Penyajian Data

Setelah data direduksi, proses selanjutnya dalam analisis data yaitu dengan menampilkan data. Data hasil penelitian dapat disajikan ke dalam berbagai bentuk, seperti bagan, diagram, *flowchart*, uraian singkat, dan bentuk lainnya.

3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)

Kesimpulan yang diharapkan dari hasil penelitian kualitatif yaitu penemuan baru dari penelitian yang sebelumnya sudah ada. Penemuan baru ini dapat berbentuk deskripsi ataupun gambaran dari objek penelitian yang masih diimajinasikan, sehingga selanjutnya dapat diteliti dan dikaji menjadi lebih jelas. *Conclusion Drawing* ini dapat berupa hipotesis atau teori maupun hubungan interaktif.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.11. Sistematika Tesis

Dalam rangka mengetahui keseluruhan dari konteks atau isi tesis ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian tesis ini disusun dengan uraian sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dibahas terkait dengan uraian latar belakang yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya penelitian ini, keaslian penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Uraian latar belakang yang dibahas pada bab ini mengkaji terkait permasalahan yang terjadi pada saat dilaksanakannya proses pemungutan retribusi dalam pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon. Bagian keaslian penelitian digunakan untuk menunjukkan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai acuan dalam penelitian ini.

B. BAB II. GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

Bab II pada penelitian ini membahas terkait dengan kajian teori yang digunakan dengan mendeskripsikan secara umum bagaimana gambaran objek penelitian. Gambaran umum pada penelitian ini digunakan sebagai dasar atau landasan teori untuk melakukan analisis data. Pada bab II akan dibahas secara deskriptif mengenai strategi dan analisis kebijakan, menara telekomunikasi, pengendalian menara telekomunikasi, maupun retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

C. BAB III. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh dari berbagai tahapan pengumpulan data yang sudah dilakukan. Hasil penelitian yang dikaji memuat tentang penyajian data melalui hasil wawancara dari beberapa informan ataupun kuisioner yang sebelumnya sudah dibagikan kepada sejumlah responden. Bab III ini juga menguraikan hasil penelitian terkait mekanisme retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, faktor-faktor yang berpengaruh, serta strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan PAD.

D. BAB IV. ANALISIS/PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab IV pada penelitian ini menguraikan tentang analisis hasil penelitian yang sebelumnya telah disajikan dalam bab III. Pada bab ini, hasil penelitian yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis hasil penelitian harus dapat menjawab rumusan masalah yang diberikan, seperti mekanisme retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, serta menganalisis strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan PAD.

E. BAB V. PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini hanya berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan ini harus dapat menjawab tujuan penelitian, sehingga sesuai dengan topik penelitian yang ingin dikaji oleh penulis.